

**PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI
MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Skripsi



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Yusron Munawir

NIM. 20140610138

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusron Munawir

NIM : 20140610138

Judul Skripsi : **PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA
KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 15 Mei 2019

Yang menyatakan,

A green and yellow postage stamp with a value of 3000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'BANKERAI TEMPEL' and '3000 RUPIAH'. A handwritten signature is written over the stamp.

Yusron Munawir
NIM: 20140610138

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

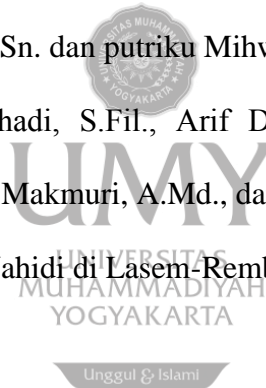
Unggul & Islami

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Ibuku Hj. Siti Marjam dan Bapakku H. Nur Cholis Mas'udan (Alm).
2. Istriku tercinta Chatibah Silmi, S.Sn. dan putriku Mihwari Nasila Nur.
3. Saudara-saudaraku Ma'shum Ahadi, S.Fil., Arif Dimyati, S.Ag., S.Pd.O., Muthmainnah, S.H.I., Abdul Aziz Makmuri, A.Md., dan Iffa Luthfiyah, S.Ked.
4. Segenap Keluarga Besar PP Al-Wahidi di Lasem-Rembang.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Konsep Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemilihan Umum	7
1. Konsep Negara Hukum	7
2. Demokrasi	12
3. Pemilihan Umum	17
B. Hak Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif	28
1. Konsep Hak Asasi Manusia	28

2. Perlindungan Hak Politik	31
3. Hak Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Jenis Data	42
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Teknik Pengelolaan Data	43
E. Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	46
A. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	46
1. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Hanya Melalui Undang-Undang dan Putusan Hakim	46
2. Perubahan Norma Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	49
3. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	59
B. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	68
1. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif melalui Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018	68
2. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi	

Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia	73
3. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	76
4. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	80
5. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Pasca Putusan MA Nomor 30 P/HUM/2018 dan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018.....	83
6. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	98
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
A. Buku	105
B. Jurnal	106
C. Skripsi	107
D. Makalah	107
E. Peraturan Perundang-undangan	107
F. Putusan	108

